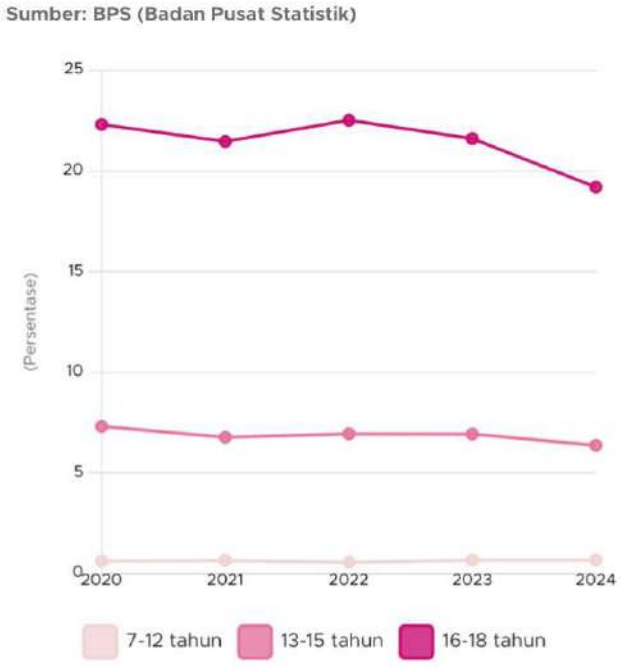
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan penting dalam membangun bangsa ini. Pendidikan adalah tiang utama bagi kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 dinyatakan bahwa " Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Pendidikan merupakan hak yang harus di peroleh setiap warga negara baik itu pendidikan formal maupun non formal dan pemerintah wajib memberikan pendidikan yang merata kepada seluruh warga negaranya. Masih banyak penduduk yang tidak menempuh pendidikan dasar, putus sekolah dan menyebabkan kurangnya dukungan pemerintah untuk pendidikan.

Gambar 1
Angka Anak Tidak Sekolah di Indonesia tahun 2020-2024



Sumber : (Alfathi 2025)

Data pada Gambar 1 menunjukkan angka anak tidak sekolah di Indonesia dari tahun 2020-2024. Anak usia 16-18 tahun merupakan anak dengan angka tertinggi meskip mengalami penurunan. Sedangkan, anak usia 7-12 tahun

merupakan anak dengan angka terendah, dengan tren relatif stabil dan mengalami peningkatan tahun 2024 (Alfathi 2025).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pada pasal 1 ayat 1 dinyatakan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Program wajib belajar ini berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia yang tercantum pada pasal 2 ayat 1. Dengan adanya program wajib belajar ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal pendidikan dasar. Dalam Pembukaan Undang – undang dasar 1945 pada alinea ke-empat berbunyi *"Mecerdaskan kehidupan bangsa".* Ini menunjukkan bahwa pendidikan sangatlah penting di Indonesia. Untuk itu persoalan anak putus sekolah termasuk masalah pendidikan yang harus ditangani.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 1, pemerintah pusat dan daerah memiliki hak untuk membina, mendukung, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut, undang-undang tersebut mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun yang biayanya ditanggung oleh negara. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan, termasuk tingginya angka putus sekolah baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah, yang berdampak pada kesulitan mencari pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat 8, mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah berdasarkan otonomi. Hal ini berarti,

sebagian urusan pemerintah provinsi, termasuk pendidikan, dilimpahkan ke pemerintah daerah. Pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren pelayanan dasar, sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 1, yang berarti tanggung jawabnya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu provinsi yang strategis di kawasan Indonesia Timur. Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan serius dalam sektor pendidikan. Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa tahun 2024 terdapat sekitar 175.048 anak yang tidak bersekolah di wilayah ini. Kebanyakan dari mereka berhenti di jenjang Sekolah Dasar (SD) atau tidak melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data angka anak tidak sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.

Kota Makassar adalah ibukota di Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Di kota sebesar ini, anak tidak sekolah di Kota Makassar masih terbilang cukup banyak. Data anak tidak sekolah dari 24 Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar menduduki peringkat pertama tertinggi dengan jumlah keselurahan 35.948 anak. Banyaknya anak tidak sekolah menjadi penyebab rendahnya rata-rata tahun sekolah. Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan *"peserta didik dalam usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar hingga tamat dan memperoleh ijazah"* artinya pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab atas pendidikan mereka hingga selesai dan tidak ada lagi anak tidak sekolah di Kota Makassar. Angka anak putus sekolah di kota Makassar pertahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1
Jumlah Anak Tidak Sekolah Di Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Kabupaten/Kota	Data Anak Tidak Sekolah 2024
Kab. Maros	5.431
Kab. Pangkajene Kepulauan	6.694
Kab Gowa	15.904
Kab Takalar	3.854
Kab. Jeneponto	13.321
Kab. Barru	2.636
Kab. Bone	17.566
Kab. Wajo	10.182
Kab. Soppeng	2.803
Kab. Bantaeng	3.776
Kab. Bulukumba	9.294
Kab. Sinjai	2.328
Kab. Kepulauan Selayar	1.690
Kab. Pinrang	7.018
Kab. Sidenreng Rappang	7.181
Kab. Enrekang	4.036
Kab. Luwu	5.963
Kab. Tana Toraja	1.312
Kab. Luwu Utara	6.057
Kab. Luwu Timur	4.344
Kb. Toraja Utara	1.847
Kota Makassar	35.948
Kota Parepare	1.947
Kota Palopo	3.916
Jumlah	175.048

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Makassar 2024

Tabel 2
Angka Anak Tidak Sekolah di Kota Makassar Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah BPB		Jumlah LTM		Jumlah DO		TOTAL
	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	
Kec. Mariso	174	158	72	138	70	56	668
Kec. Mamajang	172	193	76	85	50	36	612
Kec. Tamalate	712	912	279	425	218	134	2.680
Kec. Makasar	298	290	191	222	103	54	1.158
Kec. Ujung Pandang	45	49	30	26	18	2	170
Kec. Wajo	77	106	26	38	19	19	285
Kec. Bontoala	235	274	66	170	76	65	886
Kec. Ujung Tanah	153	159	234	225	744	106	1.621
Kec. Tallo	750	684	544	618	229	220	3.045
Kec. Panakukkang	411	487	212	264	136	71	1.581
Kec. Biringkanaya	466	581	263	286	247	156	1.999
Kec. Tamalanrea	352	430	163	154	92	45	1.236
Kec. Rappocini	381	436	176	165	156	61	1.375
Kec. Manggala	441	418	181	241	186	106	1.573
Kec. Kep. Sangkarrang	53	37	20	25	9	4	148
Jumlah	4.720	5.214	2.533	3.082	2.353	1.135	18.367

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Makassar 2024

Ket : Belum Pernah Bersekolah (BPB), Lulus Tidak Melanjutkan pendidikan (LTM) dan Putus Sekolah (DO).

Pada tabel diatas yang bersumber data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan terkait kondisi pendidikan di Kota Makassar, khususnya mengenai angka putus sekolah. Pada tahun 2024, data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat adanya 18.367 anak tidak Sekolah. Meskipun demikian, data ini sekaligus menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memahami besarnya permasalahan dan mengambil tanggung jawab penuh untuk menanggulangi anak tidak sekolah di Kota Makassar.

Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah Kota Makassar sudah melaksanakan program “1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi”. Program ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Makassar Tahun 2021-2026. Tujuan dari program ini yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada anak dari keluarga kurang mampu dan mendorong anak berprestasi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan mengurangi angka anak tidak sekolah di Kota Makassar. Program ini menargetkan 400 anak lorong mendapatkan beasiswa setiap tahunnya. (“RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026,” n.d.).

Tabel 3
Jumlah Penerima Beasiswa“1000 Anak Lorong Berprestasi” 2023-2024

Kecamatan	Siswa Penerima Beasiswa					
	2023		Total	2024		Total
	SD	SMP		SD	SMP	
Kec. Mariso	7	2	9	4	1	5
Kec. Mamajang	5	15	20	22	36	58
Kec. Tamalate	12	7	19	20	19	39
Kec. Makasar	21	9	30	13	4	17
Kec. Ujung Pandang	11	20	31	9	31	40
Kec. Wajo	0	3	3	6	1	7
Kec. Bontoala	2	2	4	8	2	10
Kec. Ujung Tanah	17	4	21	4	5	9
Kec. Tallo	8	6	14	12	11	23
Kec. Panakukkang	9	5	14	15	2	17
Kec. Biringkanaya	54	77	131	17	19	36
Kec. Tamalanrea	38	35	73	9	22	31
Kec. Rappocini	8	8	16	36	29	65
Kec. Manggala	8	7	15	23	12	35
Kec. Kep. Sangkarrang	0	0	0	2	6	8
Jumlah	200	200	400	200	200	400

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Makassar 2023-2024

Sesuai dengan target setiap tahunnya yang tercantum dalam RPJMPD Kota Makassar tahun 2021-2026. Data diatas menunjukkan pada setiap tahunnya ada 400 anak dari 15 Kecamatan mendapatankan beasiswa tersebut. Hal ini menunjukkan pencapaian target pada tahun 2023-2024.

Program ini telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Pemerintah Kota Makassar memiliki tujuan untuk mengurangi angka anak tidak sekolah, terutama

di wilayah padat penduduk seperti lorong-lorong di kota ini. Meskipun program ini telah berjalan, data menunjukkan bahwa jumlah anak tidak sekolah di Kota Makassar masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, program “1000 anak lorong berprestasi” perlu dilakukan evaluasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis berharap membantu permasalahan ini dengan pembuatan *Policy Brief* diharapkan dapat membantu permasalahan yang terjadi dengan rekomendasi atau alternatif kebijakan yang diberikan, *Policy Brief* ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Makassar dalam menanggulangi anak tidak sekolah di kota makassar dengan alternatif-alternatif terkait permasalahan pendidikan dan angka anak tidak sekolah menurun perlahan setiap tahunnya kedepan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program 1000 beasiswa anak lorong berprestasi di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, peneliti ini memiliki tujuan adalah untuk mengevaluasi program 1000 beasiswa anak lorong berprestasi di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan, menambah wawasan, serta meningkatkan pemahaman mengenai evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, khususnya terkait Program

1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengkaji evaluasi kebijakan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah anak tidak sekolah di Kota Makassar melalui optimalisasi program beasiswa dan menemukan alternatif solusi terkait masalah anak tidak sekolah di Kota Makassar.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya bagi orang tua dan peserta didik penerima program beasiswa, dengan menyediakan informasi terkait efektivitas serta kendala dalam pelaksanaan Program 1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi.